

► KONFLIK KPK VS POLISI

Jangan Menggali Kuburan Masa Depan

Bernadetha Dian Saraswati
bernadetha@harianjogja.com

JOGJA—Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja membentuk Tim Independen yang terdiri dari tujuh tokoh untuk meredam kisruh KPK versus polisi. Salah satu anggota tim, Ahmad Syafii Maarif, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, menginginkan

independensi penuh.

“Saya bersedia bergabung dengan tim asal tidak dikerangkeng. Maksudnya tidak boleh ada pihak lain yang menyeterim tim ini,” kata dia di halaman Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Senin (26/1).

Dia bergabung bersama



Syafii Maarif

tokoh lainnya, yakni mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas, mantan Wakapolri Komjen (purn) Oegroseno, pengamat kepolisian dan akademikus Bambang Widodo Umar, Guru Besar

Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, serta mantan pimpinan KPK Tumpak Hatorangan Panggabean.

Syafii Maarif turut melakukan orasi pernyataan sikap terhadap kasus KPK versus polisi di halaman kampus UMY, kemarin.

● Lebih Lengkap Halaman 7

Jangan Menggali...

Dalam orasinya, ia menyatakan negara harus bertindak cepat mengatasi masalah di antara KPK dan polisi karena jika tidak, sama halnya Indonesia menggali kubur masa depannya sendiri.

Pria yang sering disapa Buya Syafii ini optimistis Tim Independen mampu menyelesaikan perseteruan KPK dan polisi secepatnya. Dalam kesempatan itu, Rektor UMY, Bambang Cipto mengatakan korupsi adalah kejahatan kemanusiaan yang harus segera diberantas. “Kami mencintai kinerja KPK dan memberi dukungan agar kinerjanya jauh dari kriminalisasi,” ujar dia.

Terpisah, Presiden Jokowi mengatakan pembentukan tim itu untuk memberinya masukan terkait persoalan yang saat ini terjadi. “Wantimpres [Dewan Pertimbangan Presiden] juga kasih pertimbangan, kemudian dari tim juga berikan masukan-masukan. Semakin banyak masukan semakin baik,” jelas Jokowi di Jakarta, Senin.

Saat ditanya apakah Tim Independen itu memerlukan Keputusan Presiden (Keppres) sebagai dasar untuk bekerja, Jokowi menjawab singkat. “Ya nanti dili-

hat,” ujar dia.

Sementara, di tengah derasnya dukungan publik kepada KPK, kritikan terhadap Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijanto juga semakin kuat. Tedjo yang menganggap pendukung KPK sebagai rakyat yang tidak jelas dilaporkan ke Bareskrim Polri, Senin kemarin.

Ketua Forum Warga Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan melaporkan Tedjo. “Kami menganggap Pak Tedjo sebagai menteri telah melakukan penghinaan terhadap rakyat Indonesia. Saya merasa terhina dengan pernyataan Pak Tedjo yang menyebut rakyat tidak jelas. Tapi sampai sekarang tidak minta maaf,” katanya di Bareskrim Polri.

Tuntutan pencopotan Tedjo dari kursi menteri juga mengemuka. Koordinator Nasional Jaringan Duta Joko Widodo, Joanes Joko, mengatakan Tedjo tidak paham dengan semangat Nawa Cita. Nawa Cita merupakan sembilan agenda prioritas pemerintah yang dinyatakan Jokowi saat kampanye. “Kami mendukung Presiden Jokowi untuk mengganti Menteri Tedjo,” kata Joanes. (Bisnis.com/Detik/Antara/tempo.co/JIBI)